

ABSTRAK

Irpan Nurhadi. *Dampak Domisili Kepala Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya)*, Skripsi, Pembimbing I: Dra. Hj. Rusdiah, M.H.I., Pembimbing II: Ergina Faralita, S.H., M.H., pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2023).

Kata Kunci: Domisili, Kepala Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa Kalapeh Baru yang tidak berdomisili atau bertempat tinggal dan berada di desa yang dipimpinnya. Keadaan demikian berlangsung sejak Pandemi Covid-19 tahun 2020 sehingga diasumsikan berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru seperti dalam hal pelayanan hingga masyarakat cukup sulit untuk mendapatkan pelayanan secara langsung dari Kepala Desa.

Beranjak dari masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dampak domisili Kepala Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum dilingkungan masyarakat dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru tidak berjalan secara maksimal karena Kepala Desa tidak berdomisili serta bertempat tinggal di Desa Kalapeh Baru akibatnya hal tersebut juga berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa yang tidak tinggal di desa akan sulit terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari pemerintahan desa. Hal ini dapat menghambat komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat desa. Kepala Desa yang tidak hadir secara fisik di desa akan sulit memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi kewajibannya.